

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman dengan adanya globalisasi mengakibatkan penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan lebih meluas. Salah satu dampak dari adanya globalisasi yaitu adanya media sosial. Media sosial hadir sebagai jembatan baru untuk berkomunikasi dengan jangkauan koneksi yang semakin luas sehingga memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan jarak yang sangat jauh. Dengan media sosial, pengguna bisa saling bertukar pesan, melakukan panggilan suara, ataupun melakukan panggilan video untuk berkomunikasi. Kehadiran media sosial ini berdampak pada perubahan cara berkomunikasi dari yang awalnya bersifat konvensional menjadi lebih modern dan serba digital (Setiadi, n.d.).

Dampak lain dari adanya globalisasi yaitu fokus kajian hubungan internasional berkembang dari yang semula berbicara mengenai isu keamanan tradisional seperti konflik militer dan penguasaan wilayah, kini berkembang menjadi isu keamanan non tradisional. Salah satu isu keamanan non tradisional yang menjadi isu yang sering dibahas yaitu adanya isu keamanan global. Fokus kajian keamanan yang semula hanya pada negara kini melibatkan aktor-aktor lain selain negara, salah satunya individu dan kelompok tertentu (Sagena, W., 2019). Suatu kelompok yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan yang sama baik itu mengenai perlawanan atau tuntutan perubahan terhadap suatu sistem pemerintahan ataupun tuntutan terhadap struktur sosial yang bukan hanya terjadi

di satu negara saja namun lebih dari satu negara disebut sebagai gerakan sosial (Argenti, n.d.).

Gerakan sosial global menggabungkan masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan atau tuntutan yang sama yang kemudian menciptakan adanya kekuatan kolektif. Dalam gerakan sosial global inilah kekuatan kolektif menjadi aspek yang sangat dibutuhkan untuk membantu para aktivis mencapai tujuan mereka. Sehingga isu-isu personal yang dirasakan oleh banyak orang dan belum diketahui oleh pemerintah dapat tersampaikan lewat adanya gerakan sosial ini (Suharko, 2006).

Media yang digunakan untuk melakukan gerakan global ini bisa melalui media sosial dan demonstrasi atau kampanye secara langsung, melalui media sosial yaitu dengan mengajak orang-orang pengguna media sosial untuk ikut serta dalam gerakan tersebut. Salah satu strategi gerakan global yaitu melakukan kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Salah satu kampanye di media sosial yaitu kampanye #MeToo, adalah suatu gerakan yang menyuarakan kesadaran akan adanya kekerasan seksual. Gerakan ini diciptakan oleh Tarana Burke pada tahun 2006 yang merasa tidak berdaya setelah melihat adanya korban kekerasan seksual yang tidak bisa menyuarakan ketakutannya serta tidak bisa melaporkan kekerasan yang terjadi. Dengan memanfaatkan jaringan media sosial yang sangat luas, Tarana Burke menggunakan gerakan Me Too sebagai wadah bagi para penyintas kekerasan seksual untuk berani menceritakan dan melaporkan kekerasan yang dialami oleh korban. Awal mula Tarana Burke membentuk gerakan ini adalah untuk membantu korban kekerasan seksual terutama perempuan berkulit hitam dan perempuan muda. Tarana memulai

gerakan ini melalui media sosial bernama “*MySpace*” dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional (Snyder, 2022).

Gerakan ini juga dijadikan sebagai media untuk mengapresiasi para penyintas yang berani untuk menyuarakan pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya. Melalui gerakan #MeToo ini diharapkan kekerasan seksual dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi. Dari gerakan ini juga, membuat banyak pihak sadar akan pentingnya pencegahan kekerasan seksual untuk menghindari kerugian di masa depan seperti adanya trauma (*Vision and Theory of Change*, n.d.).

Pada tahun 2017, gerakan #MeToo menjadi perhatian dunia setelah salah seorang aktris kelahiran New York bernama Alyssa Milano mengunggah cuitan di akun Twitternya dengan tagar Me Too dan meminta semua orang untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang dialami mereka. Cuitan Alyssa kemudian menjadi cuitan yang mendapat banyak respon dengan mayoritas respon positif yang berisi pengalaman perempuan-perempuan korban kekerasan seksual. Kombinasi antara seorang aktris yang telah dikenal banyak orang ditambah dengan pengaruh dari sosial media membuat cuitan Alyssa Milano ini menyentuh masyarakat hingga menjadi suatu gerakan yang menyebar ke seluruh negara (France, 2017).

Alyssa Milano sendiri merasa cukup terkejut ketika mendapati bahwa ada banyak pengguna Twitter saat itu yang merespon cuitannya mengenai Me Too. Milano mengatakan pada wawancara melalui sambungan telepon dengan NBC News bahwa “rasa sakit bersama yang dialami berubah menjadi suatu kekuatan bersama” (Pflum, 2018). Didukung dengan kemampuan sosial media yang

mampu menyebarkan berita ke seluruh dunia menjadikan cuitan Alyssa Milano terus mendapatkan perhatian dari masyarakat dunia. Dengan hal itu juga, muncul suatu kekuatan bersama dari gerakan global yang seiring dengan berjalannya waktu semakin membesar (Pflum, 2018).

Gerakan #MeToo di sosial media memiliki dampak yang besar, beberapa tokoh penting ikut terseret sebagai pelaku. Salah satunya yaitu Harvey Weinstein, seorang produser film Holywood yang dijatuhi hukuman setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap Alyssa Milano. Bahkan bukan hanya Alyssa Milano saja, ada beberapa aktris dan sejumlah perempuan yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual oleh Harvey Weinstein terhitung sejak tahun 90an (“Harvey Weinstein Timeline: How the Scandal Has Unfolded,” 2023).

UN Women sendiri telah melakukan penelitian terkait gerakan #MeToo ini di sosial media dan menemukan bahwa pada Oktober 2017 dan Desember 2019 ada lebih dari 24 juta *hashtag* mengenai gerakan #MeToo di Twitter, wilayah yang terlibat dalam gerakan #MeToo mengembangkan *hashtag* dengan menggunakan bahasa dari negara masing-masing, ada jangkauan yang lebih luas di mana masing-masing lima negara memiliki lebih dari satu juta tayangan, serta kata-kata yang digunakan bersamaan dengan penggunaan *hashtag* #MeToo menggambarkan kesamaan lokalitas seperti perempuan, kesetaraan, gerakan, *Times Up*, pemerkosaan, dan gangguan (Sen, 2020).

Gerakan #MeToo ini juga dilakukan di lapangan dengan aksi kampanye yang diikuti oleh kebanyakan perempuan di hampir seluruh negara. Media sosial sangat membantu dalam persebaran gerakan ini di seluruh dunia karena hampir semua orang menggunakan media sosial. Berkat adanya media sosial itulah,

gerakan #MeToo dapat tersebar di seluruh dunia. Dengan itu juga, ada semakin banyak dukungan untuk gerakan ini. Melalui media online maupun di jalanan secara langsung (Fox, 2017).

Seiring berjalannya waktu, gerakan #MeToo semakin menyebar ke seluruh negara dengan disertai beberapa tagar tambahan. Seperti di China, tagar MeToo diterjemahkan ke dalam bahasa mandarin dan digunakan di China menjadi #WoYeShi. Di Italia juga diterjemahkan menjadi #QuellaVoltaChe, di Jepang diterjemahkan menjadi #WatashiMo, di Kroasia menjadi #JaIsto, di Kanada menjadi #MoiAussi, dan beberapa tagar lain yang digunakan di tiap negara termasuk Korea Selatan (Yang, 2021).

Gelombang aktivisme gerakan #MeToo di Korea Selatan dimulai saat seorang jaksa perempuan bernama Seo Ji Hyun yang membuat pengakuan bahwa dirinya adalah salah satu korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pejabat kehakiman di salah satu siaran televisi nasional. Selain pengakuan dari Seo Ji Hyun, juga ada pengakuan dari beberapa korban lainnya yang menyeret beberapa nama besar dari beberapa sektor yang kemudian menyadarkan masyarakat lain dengan pengalaman serupa dan mulai berani melaporkan permasalahannya. Beberapa masyarakat yang sadar akan permasalahan seksual ini mengadakan kampanye dengan memanfaatkan momentum #MeToo yang sebelumnya sudah mengglobal di beberapa negara. Dimulai dari pengakuan Seo Ji Hyun dan beberapa korban lain memunculkan adanya kesadaran kolektif yang kemudian menjadi suatu gerakan sosial di Korea Selatan (Krisnamukti, 2022).

Akibat dari pengakuan masyarakat korban kekerasan seksual tersebut menarik beberapa nama terkenal dari beberapa bidang, salah satunya bidang

hiburan. Beberapa aktor yang dituduh menjadi pelaku dari kasus kekerasan seksual yaitu Jo Min Ki, ia dilaporkan telah melakukan kekerasan kepada setidaknya delapan wanita. Namun sebelum dipidana, Jo Min Ki terlebih dahulu mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Selain itu ada juga sutradara wanita bernama Lee Hyun Joo yang dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual kepada salah satu rekan wanitanya. Akibat ini, Lee Hyun Joo dihukum dengan penjara selama dua tahun dan pengunduran diri sebagai sutradara. Sektor politik juga tidak terhindar dari kemunculan terduga pelaku kekerasan seksual. Seorang mantan gubernur Provinsi Chungcheong bernama Ahn Hee Jung didakwa atas pemerkosaan terhadap sekretarisnya yang mengakibatkan Ahn Hee Jung ditangkap dan tidak bisa mencalonkan diri pada pemilihan presiden di tahun 2022. Kasus lainnya yaitu seorang anggota parlemen yang bernama Min Byung Doo, yang mengundurkan diri setelah terdapat laporan bahwa dirinya telah melakukan kekerasan terhadap seorang wanita (Meilanesia, 2021).

Bukan hanya dari sektor industri hiburan dan sektor politik, sektor pendidikan di Korea Selatan juga dilaporkan memiliki beberapa kasus kekerasan seksual sehingga tagar SchoolMeToo muncul bersamaan dengan tagar MeToo untuk menceritakan tentang kekerasan seksual di sekolah. Dari tagar SchoolMeToo ini juga memunculkan laporan-laporan mengenai tindakan kekerasan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh para guru kepada murid-muridnya. Sebelum #MeToo masuk ke Korea, terdapat laporan kasus pelecehan seksual di sekolah yang diabaikan dan tidak ditindak. Dengan adanya #MeToo, siswa-siswa yang menjadi korban kekerasan seksual oleh guru-guru

memanfaatkan momentum ini dengan menambahkan tagar SchoolMeToo disamping tagar MeToo (Meilanesia, 2021).

Masyarakat memiliki reaksi yang beragam mengenai masuknya gerakan ini ke Korea Selatan, menurut survey yang dilakukan oleh salah satu portal atau *website* pekerjaan bernama Incruit, ada lebih dari 50% responden setuju dengan adanya gerakan #MeToo untuk membantu mengatasi kasus kekerasan seksual di Korea Selatan (Jae Kyung, 2018). Selain survey, ada juga dukungan mengenai gerakan ini yang dilakukan oleh beberapa komunitas sipil di Busan. Dukungan lain juga muncul dari presiden yang saat itu masih menjabat yaitu Moon Jae In, presiden Moon menyatakan dalam wawancara bahwa ia mendukung gerakan #MeToo dan menuntut pihak berwajib untuk bertindak tegas. Masih di ranah politik, dukungan untuk gerakan #MeToo juga ditegaskan oleh partai politik bernama The Right Future yang mengusulkan RUU mengenai gerakan #MeToo di Korea ini (Jong Cheol, 2018).

Selain dukungan, gerakan #MeToo juga mendapatkan penolakan terutama oleh masyarakat laki-laki. Masyarakat laki-laki yang menolak gerakan #MeToo membuat gerakan baru yang berlawanan dengan #MeToo, yaitu gerakan #YouToo. Secara teknis gerakan ini sama dengan gerakan #MeToo yang mengungkapkan kasus kekerasan seksual, bedanya dalam gerakan ini didominasi oleh korban laki-laki. Selain itu, melalui gerakan ini laki-laki penolak gerakan #MeToo menyatakan keberatannya atas gerakan tersebut. Mereka menolak #MeToo dengan alasan bahwa mereka merasa terkepung, akibat banyaknya laporan kasus kekerasan seksual yang mayoritas korbannya adalah perempuan (Steger, 2018).

Gelombang aktivisme gerakan #MeToo tidak berhenti di reaksi masyarakat saja, gerakan ini terus berjalan hingga tuntutan-tuntutan yang digaungkan terealisasi. Gerakan #MeToo di Korea Selatan memiliki tuntutan yang lebih beragam yaitu menuntut adanya kesadaran akan kekerasan seksual dan lebih spesifik lagi menuntut adanya tindakan pencegahan kekerasan seksual terutama di tempat kerja, menuntut adanya peran aktif perempuan dalam masyarakat Korea, serta menuntut pemberlakuan hukuman yang berat terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual. Di Korea Selatan sendiri, kejahatan kekerasan seksual bukan hanya dalam bentuk pemaksaan pemerkosaan tetapi juga dalam bentuk penguntitan melalui kamera tersembunyi yang sangat terkenal di Korea Selatan (Haeryun, 2020).

Para pelaku kekerasan seksual menempatkan kamera di hampir setiap sudut yang sering didatangi oleh perempuan. Kekerasan seksual ini sering disebut sebagai '*Molka*' dalam bahasa Korea atau *spycams*. *Spycams* atau kamera tersembunyi sering ditempatkan di area publik seperti kamar rumah sakit, kamar hotel, dan toilet umum yang digunakan untuk mengambil foto atau video korban tanpa korban sadari. Hal ini menyebabkan perempuan-perempuan Korea Selatan lebih waspada saat menggunakan fasilitas publik (Bartlett, 2022).

Korea Selatan juga memiliki budaya "*Hoesik*" di lingkungan kerja, di mana dalam budaya ini pegawai baru diajak untuk minum bersama oleh pegawai lama. Karena Korea Selatan mengadaptasi nilai-nilai konfusiusme, hirarki menjadi salah satu hal yang sering ditemukan di Korea. Itu sebabnya, pegawai baru pasti sulit untuk menolak ajakan dari pegawai lama yang dianggap sebagai senior di tempat

kerja. Budaya minum ini juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan seksual di Korea Selatan (Nataliani, 2022).

Selain kekerasan seksual berbentuk *spycams*, kekerasan seksual juga bisa terjadi saat sedang mengikuti budaya atau tradisi. *Hoesik* menjadi suatu ketakutan bagi pegawai baru terutama perempuan. Karena dalam budaya ini, tidak jarang semua orang yang ikut akan merasakan mabuk setelah banyak meminum alkohol. Setelah mabuk, pegawai perempuan akan dimanfaatkan dan berakhir terjadinya kekerasan seksual (Nataliani, 2022).

Dalam demonstrasi dan siaran televisi serta video Youtube, tuntutan demonstran yaitu adanya kesadaran bahwa kekerasan seksual itu nyata dan menuntut hukuman yang lebih berat untuk pelaku kekerasan seksual. Para demonstran yang tidak hanya terdiri dari perempuan ini meminta korban pelecehan seksual untuk berani menyampaikan pengalamannya agar pelaku pelecehan dapat dihukum dengan berat. Tuntutan lainnya yaitu adanya hukuman atau sanksi yang lebih berat kepada para pelaku kekerasan seksual. Selain itu, gerakan #MeToo di Korea Selatan juga membicarakan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan peran wanita dalam masyarakat Korea (Gibson, 2019).

Di Korea Selatan sendiri, budaya patriarki masih sangat kental sehingga kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan peran wanita dalam masyarakat menjadi topik yang panas apabila diperbincangkan. Diskusi mengenai peran perempuan di masyarakat Korea Selatan selalu menimbulkan pro dan kontra. Kehadiran gerakan #MeToo di Korea Selatan seakan membukakan pintu bagi para perempuan Korea Selatan. Meski gerakan #MeToo berfokus pada tuntutan akan kesadaran adanya kekerasan seksual, namun di Korea Selatan

gerakan ini dimanfaatkan sebagai media untuk menyuarakan ketidakadilan yang diterima oleh perempuan. Itu sebabnya, ketika gerakan #MeToo sampai di Korea, tuntutan dalam gerakan itu tidak hanya tentang kesadaran akan kekerasan seksual saja (Gibson, 2019).

Tuntutan akan peran perempuan dalam masyarakat Korea Selatan diakibatkan oleh adanya budaya patriarki yang masih mengakar kuat. Patriarki seakan menekan peran perempuan untuk hanya sebatas hakikat perempuan saja, dibuktikan dengan adanya larangan untuk perempuan yang sudah menikah tetap bekerja sejak tahun 1985 yang kemudian menggerakkan sekelompok perempuan untuk berani menggugat perusahaan-perusahaan yang mewajibkan perempuan untuk pensiun dini setelah menikah (Kardina & Yurisa, 2021).

Melawan budaya patriarki di Korea Selatan bukanlah hal yang mudah, adanya gerakan #MeToo di tahun 2018 tidak langsung menyadarkan orang-orang akan adanya kekerasan seksual yang banyak dialami oleh perempuan. Di tahun yang sama, Presiden Korea Selatan saat itu, Moon Jae In menyatakan dukungannya atas gerakan #MeToo dan menghormati korban yang berani untuk angkat bicara. Presiden Moon juga mendesak pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus kekerasan seksual tersebut secara menyeluruh (Heekyong, 2018a). Selain mengapresiasi para korban yang berani melapor, presiden Moon juga menyatakan dukungan aktifnya kepada gerakan #MeToo di Korea Selatan (Babe, 2018).

Sebelumnya, buku dengan judul “Kim Ji Young, Born in 1982” juga mendapat reaksi masyarakat terutama laki-laki. Kaum pria di Korea menunjukkan ketidaksetujuannya dengan isi buku tersebut. Buku “Kim Ji Young, Born in 1982”

menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan di tengah tuntutan budaya patriarki yang pada akhirnya menyebabkan Kim Ji Young kehilangan jati dirinya dan mengalami depresi. Buku tersebut juga menggambarkan bagaimana patriarki menekan perempuan dalam masyarakat Korea Selatan. Akibatnya, reaksi kontra banyak berdatangan dari kaum laki-laki Korea. Mereka merasa bahwa akibat dari budaya patriarki bukan hanya dirasakan oleh perempuan saja melainkan juga laki-laki dengan adanya wajib militer yang wajib diikuti oleh laki-laki sedangkan perempuan dibebaskan dari kewajiban mengikuti pelatihan wajib militer (Steger, 2018).

Sekelompok laki-laki Korea bahkan membuat proyek balasan untuk buku “Kim Ji Young, Born in 1982” dengan menciptakan buku “Kim Ji Hoon Born 1990” yang menceritakan tentang ketidakadilan yang diterima oleh kaum laki-laki karena hanya laki-lakilah yang wajib untuk mengikuti pelatihan militer sedangkan perempuan tidak. Meskipun demikian, pada akhirnya buku proyek ini ditarik dari peredaran (Heran, 2018).

Adanya budaya patriarki yang mengakar di masyarakat Korea Selatan menjadikan kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan seringkali diabaikan. Bahkan seringkali pelaku tidak ditindak dengan benar, inilah yang menjadi alasan tuntutan hukuman yang lebih berat kepada pelaku dalam gerakan #MeToo di Korea Selatan. Menurut *Korean Statistical Information Service* (KOSIS), angka kekerasan seksual di Korea Selatan pada tahun 2015 mencapai 17.210, dua kota yang memiliki angka kasus kejahatan seksual tertinggi yaitu Seoul dengan 9.565 kasus dan Incheon dengan 1.982 kasus (KOSIS, 2015). Kemudian di tahun 2016 tercatat 15.604, pada tahun ini dua kota yang memiliki

angka kejahatan seksual yang tinggi yaitu Seoul dengan 8.390 kasus dan Incheon dengan 2.133 kasus (KOSIS, 2016). Pada tahun 2017 tercatat secara nasional Korea Selatan memiliki 18.182 laporan kejahatan seksual yang didominasi oleh kota Seoul dengan 10.014 kasus dan Incheon dengan 2.456 kasus (KOSIS, 2017).

Adanya peningkatan dan penurunan angka kasus kekerasan seksual ditambah dengan adanya desakan masyarakat lewat gerakan #MeToo membuat pemerintah harus mengambil langkah cepat yaitu dengan mengubah kebijakan perundang-undangan tentang kekerasan seksual. Dengan begitu, kasus kekerasan seksual di Korea Selatan setidaknya dapat dikendalikan dengan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku, serta perlindungan terhadap korban. Banyaknya angka kasus kekerasan seksual di Korea menjadi suatu tuntutan bahwa permasalahan kekerasan seksual merupakan permasalahan yang cukup *urgent*. Lewat masuknya #MeToo ke Korea yang dimanfaatkan oleh para korban kekerasan seksual untuk meminta perlindungan kepada pemerintah membuat peneliti merasa hal ini penting untuk diteliti guna melihat bagaimana suatu gerakan sosial mampu mengubah kebijakan yang sebelumnya tidak berubah meskipun desakan dari masyarakat itu sendiri sudah sangat banyak yang dibuktikan dengan angka laporan kasus.

Berdasarkan latar belakang dan keresahan tersebut, peneliti mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Dampak Gerakan #MeToo terhadap Perubahan Kebijakan tentang Kekerasan Seksual di Korea Selatan Tahun 2018-2021**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana #MeToo sebagai gerakan sosial global dapat memengaruhi perubahan kebijakan tentang kekerasan seksual di Korea Selatan?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah peneliti tuliskan sebelumnya, peneliti perlu membatasi pokok permasalahan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada sesuatu yang sangat penting. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

Peneliti membatasi penelitian dengan memfokuskan pada Korea Selatan dengan periode 2018-2021. Gerakan #MeToo yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2018 menciptakan adanya perubahan dalam kebijakan perundang-undangan di Korea Selatan. Perubahan kebijakan tentang kekerasan seksual di Korea Selatan terjadi di tahun setelahnya yaitu tahun 2019. Perubahan kebijakan dan pasca perubahan kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan peneliti dalam penelitian ini. Peneliti akan membahas bagaimana sebuah gerakan global dapat mengubah kebijakan di suatu negara.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi permasalahan kekerasan seksual di Korea Selatan
2. Untuk mengetahui dinamika gerakan #MeToo di Korea Selatan sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan seksual di tahun 2018 hingga 2021
3. Untuk mengetahui dimensi gerakan sosial global dalam gerakan #MeToo di Korea Selatan
4. Untuk mengetahui kendala dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di Korea Selatan

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1.4.2.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai prasyarat keululusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

1.4.2.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional terutama mengenai gerakan global.